

TOLAK PELANTIKAN ANGGOTA BP2N

Pernyataan Sikap Masyarakat Film Indonesia

Pada hari ini, Kamis, 5 April 2007, tepat pukul 10.00 wib, ***menurut rencana dan menurut informasi serta kabar yang kami terima via sms***, Pemerintah qq Departemen Kebudayaan dan Pariwisata akan melantik anggota BP2N yang baru untuk masa periode 2006-2009.

Pelantikan terhadap anggota BP2N Periode 2006-2009 bukan saja merupakan ironi bagi dunia perfilman bahkan semakin menambah carut marutnya persoalan dunia perfilman Indonesia. Pelantikan terhadap anggota BP2N Periode 2006-2009 jelas bukan merupakan jawaban bagi penyelesaian persoalan perfilman Indonesia. Ia justru akan menambah persoalan baru. Bukan saja karena banyak pertanyaan yang muncul terkait pertanggung jawaban fungsi, tugas dan wewenang, serta pendanaan anggota BP2N periode 2003-2006, yang tidak dilakukan secara tranparan, yang hingga saat ini Masyarakat Film Indonesia tidak mengetahuinya. Adalah layak dan patut anggota BP2N periode sebelumnya menyampaikan secara terbuka kepada public setidaknya-tidaknya kepada Masyarakat Film Indonesia Laporan Resmi Akhir Masa Jabatannya. Bukan hanya itu, pun proses pencalonan anggota BP2N Periode 2006-2009 yang dilakukan secara tertutup tidak transparan.

Pelantikan terhadap anggota BP2N Periode 2006-2009 oleh Pemerintah semakin memberikan gambaran nyata dan terang kepada publik bahwa Pemerintah tidak mempunyai AGENDA KULTURAL yang jelas akan arah, maksud dan tujuan pembangunan kebudayaan Indonesia melalui perfilman. Yang kami, Masyarakat Film Indonesia butuhkan bukan penyelesaian secara parsial atas persoalan yang menimpa dunia perfilman Indonesia melainkan secara penyelesaian secara komprehensif dan menyeluruh atas terpuruknya dunia perfilman Indonesia.

Pada hari ini pula, Kamis 5 April 2007, tepat 3 bulan terhitung sejak Masyarakat Film Indonesia (MFI) pada tanggal 3 Januari 2007, mengeluarkan pernyataan sikap terhadap persoalan-persoalan dalam

sistem pengelolaan perfilman yang dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar), dan juga Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) sebagai lembaga tertinggi dalam sistem organisasi film Indonesia. Pun Kami melakukan dialog-dialog dengan pihak-pihak terkait tersebut guna memberikan masukan dan mencari solusi dalam menanggapi tuntutan Kami. Akan tetapi nampaknya dialog-dialog tersebut hingga saat ini belum menunjukkan hasil. Bisa jadi Pemerintah tidak peduli akan pembangunan kebudayaan Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami menyatakan SIKAP:

MENOLAK PELANTIKAN ANGGOTA BP2N PERIODE 2006-2009

Dan MENUNTUT :

1. Presiden segera menyusun AGENDA KULTURAL bagi PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN INDONESIA tertuang pada bidang perfilman, yang komprehensif dan menyeluruh. AGENDA KULTURAL mana harus menyangkut pada: Perubahan paradigma atas kebijakan dan regulasi perfilman Indonesia dengan segala aspek yang terkandung didalamnya (ekonomi, sosial dan budaya) termasuk aspek penghormatan terhadap HAM khususnya hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat untuk mengejawantahkan AGENDA KULTURAL dimaksud dalam produk undang-undang yang menjawab kebutuhan insan perfilman Indonesia.

Demikian Pernyataan Sikap ini Kami Buat.

Mari Peduli Film Indonesia!

Jakarta, 5 April 2007